

DAMPAK KUDETA PRESIDEN VIKTOR YANUKOVYCH DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI UKRAINA DENGAN UNI EROPA

Fahri Ananta Said
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Negara Indonesia
Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240
fahrianantasaid@gmail.com

Partogi J. Samosir
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110
partogijksamosir@gmail.com

Abstrak

Pada masa pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych, Ukraina cenderung lebih dekat dengan Rusia. Hal itu terbukti dengan keputusannya untuk menyetujui perjanjian jual beli gas murah dari Rusia pada tanggal 21 April 2010. Keputusan tersebut membuat hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa terlihat menjauh dan tidak konsisten. Padahal Viktor Yushchenko, Presiden Ukraina sebelumnya, telah menginisiasikan sebuah kerja sama pembangunan politik dan ekonomi dengan Uni Eropa melalui sebuah perjanjian asosiasi dan Zona Perdagangan Bebas Mendalam-Komprehensif. Ketidakkonsistenan hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa selanjutnya terbukti dengan keputusan Yanukovych untuk menolak penandatanganan perjanjian asosiasi pada tanggal 21 November 2013. Hal itu memicu protes massa secara masif dari rakyat Ukraina. Mereka marah karena Yanukovych telah berupaya untuk menggagalkan impian mereka untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Oleh sebab itu, Parlemen mendepak Yanukovych dari jabatannya pada tanggal 22 Februari 2014. Peristiwa kudeta tersebut berdampak dalam konsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa sebab setelah kudeta berakhir, presiden baru Ukraina yang bernama Petro Poroshenko akhirnya menandatangani dan menindaklanjuti perjanjian asosiasi. Zona Perdagangan Bebas Mendalam-Komprehensif pun dapat diimplementasikan.

Kata kunci: kudeta, hubungan luar negeri, Ukraina, Uni Eropa, Viktor Yanukovych

Abstract

Under the leadership of President Viktor Yanukovych, Ukraine tend to be closer to Russia. It can be proven by his own decision to deal an agreement about selling or buying cheaper gas from Russia in April 21, 2010. The deal makes Ukraine's foreign relations toward the European Union becomes far and inconsistent. Though Viktor Yushchenko, former Ukrainian President, had initiated a political and economic development with the European Union through an association agreement and a Deep Comprehensive Free Trade Area. Another inconsistent action of Yanukovych proved by his decision to not sign or follow up an association agreement in November, 21 2013. It responded with a massive protest by Ukrainian. They were angry due to Yanukovych's action that would

eliminate their dream to be a part of the European Union. Then, the parliament ousted Yanukovych from his position in February, 22 2014. The coup affected to make Ukraine's foreign relations toward the European Union more consistent because after the coup, the new president of Ukraine Petro Poroshenko has agreed to sign and follow up an association agreement, so the Deep Comprehensive Free Trade Area can be implemented.

Keywords: coup, foreign relations, Ukraine, European Union, Viktor Yanukovych

Pendahuluan

Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang memutuskan untuk memisahkan diri dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991. Sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini, Ukraina terus melakukan pembenahan ekonomi dan politik yang masih menjadi permasalahan utama bagi Ukraina. Pembenahan ekonomi dan politik dapat dianggap sebagai sebuah bentuk reformasi. Hal itu yang menjadi salah satu sebab Ukraina melakukan revolusi. Revolusi Ukraina pertama kalinya terjadi pada tahun 2004 dalam era kepemimpinan Leonid Kuchma, kemudian revolusi yang kedua kalinya terjadi pada tahun 2014 dalam era kepemimpinan Viktor Yanukovych (Pikulicka-Wilczewska dan Sakwa, 2015: 102).

Peristiwa Revolusi Oranye tahun 2004 mengakibatkan lengsernya rezim Leonid Kuchma yang digantikan oleh Viktor Yushchenko yang secara resmi terpilih sebagai Presiden Ukraina di tahun 2005. Pada masa

kepemimpinannya, hubungan luar negeri Ukraina lebih dekat terhadap Uni Eropa. Selain sebagai bentuk pro-nya terhadap Uni Eropa, ia juga ingin memberikan perubahan yang baru bagi Ukraina dalam bidang ekonomi dan politik. Yushchenko ingin memperbaiki sendi-sendi perekonomian Ukraina yang sempat mengalami penurunan pasca terjadinya praktik korupsi besar-besaran pada masa kepemimpinan Leonid Kuchma (Alfiansyah, 2015: 315-316).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan yaitu melalui kemitraan dengan Uni Eropa. Sebagai bentuk dari kebijakannya, Yushchenko melakukan pendekatan hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa melalui sebuah kerja sama perdagangan sehingga tepat pada tanggal 5 Maret 2007, Yushchenko berhasil menginisiasikan sebuah kerja sama perdagangan antara Ukraina dengan blok Uni Eropa yang dikenal dengan nama Zona Perdagangan Bebas Mendalam-Komprehensif atau *Deep Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA). Setahun kemudian, tepat pada

tanggal 18 Februari 2008, pembahasan antara Ukraina dengan Uni Eropa mengenai pembangunan zona perdagangan bebas tersebut kembali dilakukan. Uni Eropa meyakinkan agar jika Ukraina dapat berintegrasi dengan Uni Eropa, pertumbuhan perekonomian Ukraina akan dapat terbantu dengan prospek jangka panjang melalui perdagangan bebas (Alfiansyah, 2015: 316).

Pada masa kepemimpinan Yushchenko, hubungan luar negeri Ukraina terhadap blok Barat atau Uni Eropa sudah cukup dekat. Hal itu juga berdampak terhadap hubungan luar negeri Ukraina terhadap Rusia sehingga mengakibatkan hubungan keduanya mengalami kebuntuan (Alfiansyah, 2015: 323). Kebuntuan tersebut terjadi karena dikotomi kepentingan. Ukraina mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar terhadap Uni Eropa melalui pembangunan ekonomi dan politik bersama, sedangkan Rusia tidak bisa menerima kenyataan perihal tersebut sebab Rusia menginginkan agar Ukraina tetap menjadi bagian dalam kepentingannya. Namun, Yushchenko, selaku kepala negara, tidak mempedulikan hal tersebut. Yushchenko akan tetap melanjutkan kemitraan antara Ukraina dengan Uni Eropa yang lebih serius sehingga tepat pada tanggal 9

September 2008, sebuah keputusan baru disepakati oleh Ukraina dengan Uni Eropa. Dalam kesepakatan tersebut dihasilkan sebuah perjanjian baru yang dikenal sebagai perjanjian asosiasi. Perjanjian asosiasi ini mengandung beberapa hal yang cakupannya lebih luas sebab mempertimbangkan bahwa permasalahan utama Ukraina setelah merdeka bukan hanya sebatas pada permasalahan ekonomi saja, melainkan juga ada permasalahan politik di dalamnya. Dengan demikian, perjanjian asosiasi tersebut rencananya akan ditandatangani oleh Ukraina dengan tenggat waktu akhir tahun 2013 (Alfiansyah, 2015: 316-317).

Dengan berjalannya waktu, kepemimpinan Yushchenko pun berakhir sehingga pada tahun 2010 diadakan pemilihan presiden Ukraina. Dalam pemilihan tersebut, ada dua kandidat kuat yang memiliki kecenderungan berbeda. Perbedaan yang ada dalam kandidat presiden Ukraina nantinya akan sangat berpengaruh terhadap masa depan Ukraina sebab masa depan Ukraina berada di tangan presiden tersebut untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang dicapai melalui sebuah kebijakan. Kandidat presiden tersebut yaitu Viktor Yanukovych dan Yulia Tymoshenko. Yanukovych merupakan tokoh yang sangat pro-Rusia, sedangkan Tymo-

shenko, sebagai oposisinya, lebih cenderung pro-Barat atau blok Uni Eropa (VOA-Islam, 2014).

Kekhawatiran tersebut terbukti dengan keputusan yang dibuat oleh Yanukovych. Sebagai presiden yang baru saja terpilih pada tanggal 7 Februari 2010, kemudian tepat pada tanggal 21 April 2010 atau sebulan setelah terpilih Yanukovych langsung membuat sebuah kesepakatan yang sangat kontroversial. Kesepakatan tersebut dibuat atas nama Ukraina dengan Rusia. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Ukraina mendapat diskon gas sebesar 30% selama 10 tahun dan harga gas menjadi US\$ 280 per 1.000 m³. Dibandingkan sebelumnya, harga gas Ukraina hampir sama mahalnya dengan harga gas untuk negara-negara Eropa lainnya. Hal itu dapat dikabulkan, tetapi dengan satu persyaratan agar Ukraina dapat memberikan izin terhadap Rusia untuk memperpanjang sewa Armada Laut Hitam di Sevastopol dengan tambahan 25 tahun yang dihitung dari tahun 2017. Padahal jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, Ukraina tidak mau memperpanjang masa sewa Sevastopol untuk Rusia. Sehingga sangat terlihat jelas bahwa kepentingan Yanukovych selaku kepala negara Ukraina yaitu perihal proyek gas, sedangkan kepentingan Rusia adalah

Armada Laut Hitam yang masih menjadi bagian dalam wilayah teritorial Ukraina. Dengan begitu, Rusia masih ingin sekali menempatkan pengaruh besarnya di Ukraina (Alfiansyah, 2015: 323).

Kesepakatan antara Ukraina dengan Rusia yang disetujui secara sepihak oleh Yanukovych tersebut menuai pro kontra di dalam negeri Ukraina sendiri. Pro kontra muncul dari rakyat dan parlemen Ukraina. Bahkan dalam parlemen pun, suara terpecah belah. Anggota parlemen yang pro-Yanukovych tidak mempermasalahkan perihal tersebut, sedangkan anggota parlemen lainnya yang kontra terhadap Yanukovych sangat menentangnya. Pihak oposisi dalam parlemen mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar kepentingan nasional Ukraina. Namun, Yanukovych tetap membela keputusan tersebut dan mengatakan bahwa harga gas tersebut dapat membantu menstabilkan anggaran. Akan tetapi, faktor ekonomi dianggap lebih penting daripada pertimbangan politik sehingga tanpa pertimbangan dari kubu oposisi, Yanukovych langsung mengambil keputusan secara sepihak (Alfiansyah, 2015: 323-324).

Yanukovych harus tetap melanjutkan program pembangunan untuk Ukraina sehingga di bawah kepemimpinannya, Ukraina melanjutkan

kembali negosiasi dengan Uni Eropa terkait DCFTA tepat pada bulan November 2011 (Åslund, 2015: 94-95). Dalam pembahasan tersebut, ada satu permintaan Yanukovych yang mengejutkan bagi pihak Uni Eropa, yaitu agar Uni Eropa mengadakan pembicaraan trilateral untuk menyelesaikan perbedaan dengan Rusia, tetapi pihak Uni Eropa menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Uni Eropa tidak akan membiarkan aktor lain ikut campur di dalam urusan Ukraina dengan Uni Eropa (Zulfiekar dan Yunianti, 2014: 8). Hal itu semakin menunjukkan bahwa Yanukovych sangat mempedulikan Rusia dan juga sebagai wujud nyata sikap pro-Rusia-nya. Dengan demikian, potret hubungan luar negeri Ukraina di bawah kepemimpinannya cenderung mengarah kepada Rusia.

Meskipun begitu, Yanukovych harus melanjutkan kembali pembicaraan mengenai perjanjian asosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa pada bulan Maret 2012, kemudian dilanjutkan kembali dengan sebuah pembicaraan terkait perdagangan bebas pada 19 Juli 2012, tetapi perjanjian-perjanjian tersebut belum ditanda tangan (Åslund, 2015: 94-95) sebab Yanukovych masih keberatan untuk menandatangani dan memang jatuh tempo penandatanganan

perihal perjanjian asosiasi pun akhir tahun 2013 nanti.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kerja sama antara Ukraina dengan Uni Eropa semula diinisiasikan oleh Yushchenko kemudian harus tetap dilanjutkan lagi oleh Yanukovych, Ukraina diberi tenggang waktu untuk menandatangani perjanjian asosiasi beserta perdagangan bebas di akhir tahun 2013. Hal itu berarti menjadi tanggung jawab bagi Yanukovych sebagai presiden terpilih yang berhasil mengalahkan oposisinya, Tymoshenko, yang kini menjadi tahanan dalam kasus dugaan pengkhianatan kekuasaan. Dengan demikian, hal tersebut cukup menyulitkan dan menjadi dilema bagi Yanukovych.

Dilema tersebut terjadi karena pada satu sisi ia memang lebih pro terhadap Rusia. Namun, di sisi lain ia juga harus melanjutkan cita-cita Ukraina untuk menandatangani kerja sama dengan Uni Eropa yang sangat didukung oleh rakyat Ukraina karena sesuai dengan keinginannya. Rakyat Ukraina berharap agar terciptanya pasar yang luas, peluang kerja, dan perjalanan bebas visa bagi sesama anggota Uni Eropa (Åslund, 2015: 105). Mereka berharap bahwa demokrasi dan hukum di Ukraina dapat dibenahi sehingga rakyat Ukraina menginginkan adanya pembenahan dan

perubahan dalam aspek ekonomi, politik, maupun hukum di negaranya.

Dalam masa dilemanya, Ukraina di bawah kepemimpinan Yanukovych mendapat tekanan sebagai reaksi keras dari Rusia. Rusia mengetahui bahwa Ukraina harus menindaklanjuti perihal perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa yang jatuh tempo untuk ditandatangani pada akhir tahun 2013 sehingga Rusia langsung memberikan respon atas hal tersebut. Tanpa peringatan atau negosiasi, Rusia mulai memberlakukan perdagangan dengan sistem perang terhadap Ukraina. Pasar Rusia memblokir baja, coklat, dan berbagai produk pertanian yang diproduksi oleh para pengusaha Ukraina yang lebih pro terhadap blok Uni Eropa. Pada bulan Agustus 2012, Rusia memblokir perdagangan dengan Ukraina secara sepihak selama sepuluh hari. Pemblokiran dilakukan terhadap barang-barang yang diekspor oleh Ukraina agar tidak bisa memasuki pasar Rusia (Åslund, 2015: 96).

Tekanan dari Rusia berikutnya dilanjutkan oleh sebuah peringatan dari pihak Rusia atas nama Vladimir Putin. Putin langsung memberikan peringatan kepada Ukraina atas niatnya untuk menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa pada tanggal 22 Agustus 2012. Wakil Perdana Menteri Rusia Igor

Shuvalov memberitahukan kepada Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov bahwa jika Ukraina membuka batas dengan Uni Eropa, Rusia dengan tegas akan membatasi impornya dari Ukraina untuk menahan produk-produk domestiknya (Åslund, 2015: 97). Rusia sangat tidak ingin kehilangan salah satu mitra pentingnya sebagai sesama satelit Soviet. Hal itu dapat dikatakan sebagai ancaman yang berupaya untuk mempengaruhi sikap Yanukovych dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.

Akhirnya, sebuah keputusan diumumkan oleh Yanukovych pada tanggal 21 November 2013. Yanukovych mengumumkan bahwa Ukraina di bawah kepemimpinannya tidak akan melanjutkan pembahasan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa dan menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, tetapi lebih mempererat hubungannya dengan Rusia. Keputusan tersebut dibuat Yanukovych tanpa pertimbangan yang mendalam sehingga hal itu langsung memicu respon yang mengakibatkan protes massa secara besar-besaran. Aksi protes tersebut dikenal dengan sebutan *Euromaidan* yang dimulai saat Yanukovych menolak untuk melanjutkan kerja sama dengan Uni Eropa (Wilson, 2014: 66).

Protes massa dilakukan secara masif oleh seluruh rakyat di Kiev, ibukota Ukraina. Hal itu bertujuan untuk meng kudeta Presiden Yanukovych dari jabatannya. Rakyat Ukraina telah merasakan kekecewaan atas keputusan yang diambil oleh Yanukovych sebab pada pertemuannya sebelumnya, tepat pada tanggal 6 November 2013, Yanukovych berjanji akan menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (Åslund, 2015: 101). Namun, pada tanggal 21 November 2013, tiba-tiba ia membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa adanya pertimbangan yang lebih matang. Hal itulah yang menyebabkan rakyat menjadi sangat kecewa dan tidak mempercayai Yanukovych lagi.

Deutsche Welle (2013) memberitakan bahwa aksi protes di Ukraina terus berlangsung. Puluhan ribu orang pada hari Senin, 2 Desember 2013 memblokir kompleks pemerintahan. Mereka berkumpul dan bertahan dalam tenda-tenda darurat di lapangan utama di pusat kota Kiev. Aksi protes itu meluas sejak akhir minggu lalu. Azarov mengecam aksi para demonstran. Dalam sebuah pertemuan dengan para duta besar dari Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, Azarov mengatakan bahwa memblokir pekerjaan institusi kenegaraan bukanlah aksi damai,

melainkan sudah mengarah kepada kudeta. Jika kantor-kantor terus diblokade, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah tidak bisa membayar gaji dan pensiun pegawai.

Krisis politik yang hebat selama tiga bulan dan aksi demonstrasi untuk menentang pemerintah berakhir dengan keputusan Parlemen Ukraina memecat Presiden Yanukovych pada tanggal 22 Februari 2014 (VOA-Islam, 2014). Usai memecat Yanukovych, para wakil ketua parlemen juga memutuskan untuk menggelar pemilihan umum yang dipercepat pada tanggal 25 Mei 2014. Demikian juga dengan keputusan parlemen untuk membebaskan pemimpin oposisi, Yulia Tymoshenko, yang sebelumnya ditahan di sebuah rumah sakit di kota Kharkiv, Ukraina Timur.

Setelah Yanukovych diberhentikan dari jabatannya, parlemen menunjuk Oleksandr Turchynov untuk menggantikan kedudukan Yanukovych pada tanggal 23 Februari 2014. Turchynov menjabat sebagai presiden pengganti sampai pemilihan ulang digelar pada tanggal 25 Mei 2014. Sebagai presiden pengganti yang ditunjuk oleh parlemen, Turchynov mengembalikan tujuan awal yang diinginkan oleh segenap rakyat Ukraina agar dapat berintegrasi dan lebih fokus terhadap blok Uni Eropa (Alfiansyah, 2015: 317).

Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan luar negeri Ukraina lebih mengarah kepada Uni Eropa dibandingkan dengan Rusia. Ukraina mencoba memperbaiki kembali hubungannya dengan Uni Eropa pasca kudeta karena pada masa pemerintahan Yanukovych, hubungan Ukraina lebih banyak difokuskan dan didominasi terhadap Rusia yang secara fakta menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan elit politik maupun masyarakat. Oleh karena itu, Turchynov, sebagai presiden pengganti, mencoba untuk mengembalikan tujuan awal Ukraina yang sesuai dengan harapan rakyat Ukraina agar lebih fokus dengan proses integrasi terhadap Uni Eropa.

Kepentingan Nasional

Adam Smith mendefinisikan kepentingan nasional sebagai akumulasi dari kepentingan individu. Menurut E.H. Carr, konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Smith membentuk sebuah simbiosis tertentu dan komunitas kepentingan. Hal ini dapat memberikan sintesis bahwa kepentingan terbesar dari individu dan kepentingan terbesar dari komunitas terbentuk secara alami dalam waktu yang bersamaan. Dalam mencapai kepentingannya, individu membentuk komunitas, dan dalam mempromosikan kepentingan komunitasnya, mereka

mempromosikan hal itu dengan sendirinya. Ini adalah sebuah doktrin yang terkenal mengenai harmonisasi kepentingan (Burchill, 2005: 107).

Berdasarkan penjelasan mengenai kepentingan nasional yang didefinisikan oleh Smith, dinyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan akumulasi dari kepentingan individu. Hal itu memberikan gambaran bahwa kepentingan nasional bercermin pada kepentingan masyarakat sebagai kelompok individu di dalam sebuah negara. Sementara, Carr menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan akumulasi dari kepentingan individu dan kepentingan komunitas di mana dalam komunitas tersebut, individulah yang menjadi anggotanya.

Dalam penelitian ini, kepentingan nasional rakyat Ukraina, yang tergambar sebagai bentuk akumulasi dari kepentingan individu, sangat besar dalam menentukan masa depan bangsanya. Kepentingan nasional rakyat Ukraina dapat dilihat dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 November 2013, di mana seluruh rakyat Ukraina secara langsung menentang kebijakan Yanukovych yang membatalkan penandatanganan kerja sama dengan Uni Eropa melalui perjanjian asosiasi. Peristiwa tersebut menggambarkan dikotomi dari kepentingan pemerintah

sepihak dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ide Smith dikemukakan untuk mengoptimalkan hubungan antarnegara dalam mendukung perdagangan bebas serta non-intervensi pemerintah. Menurut Smith, pasar bebas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, tetapi juga agar masyarakat mampu mencapai kepentingannya tanpa intervensi (Burchill, 2005: 107). Jadi, dapat disimpulkan bahwa realisasi pasar bebas merupakan sebagai bentuk capaian dari kepentingan nasional sesuai dengan keinginan rakyat.

Dalam penelitian ini, terlihat jelas bahwa perdagangan bebas dilakukan sebagai salah satu upaya agar Ukraina dapat berintegrasi dengan Uni Eropa. Bentuk perdagangan bebas dengan Uni Eropa inilah yang sesuai dengan aspirasi rakyat Ukraina, bukan kerja sama dengan Rusia sehingga teori yang dikemukakan oleh Smith sangat relevan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini.

Kebijakan Luar Negeri

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dikenal adanya level analisis. Salah satunya adalah level analisis negara (*state level of analysis*), yang

fokus pada faktor-faktor internal dalam sebuah negara yang berpengaruh terhadap perilaku dalam kebijakan luar negerinya. Analisis tersebut meliputi: (a) Kerangka institusional sebuah negara, seperti hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan, organisasi, atau biro pemerintah; dan (b) Domestik konstitusi, seperti kepentingan kelompok, kelompok etnis, atau opini publik secara umum, kondisi ekonomi, dan sejarah atau kebudayaan nasional negara tersebut. Level analisis ini menekankan bagaimana faktor internal dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku negara dalam panggung politik global. Dalam pembuatan sebuah kebijakan, faktor-faktor tersebut menjadi parameter dan penentu yang memungkinkan bagi pemimpin (Breuning, 2007: 16-17).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, dijelaskan bahwa untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, perlu sebuah formulasi pada level analisis negara di mana dalam level analisis tersebut ada dua poin utama yang menjadi indikator untuk membuat kebijakan luar negeri. *Pertama*, kerangka institusional yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Apabila poin tersebut dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat

dengan jelas bahwa ada ketidakharmonisan dalam hubungan antara Yanukovych sebagai aktor eksekutif dan parlemen sebagai aktor legislatif negara. Ketidakharmonisan antara kedua aktor tersebut terbukti ketika Yanukovych baru saja terpilih sebagai presiden pada bulan Februari 2010, kemudian pada tanggal 21 April 2010 ia langsung menyetujui perjanjian sewa kontrak Sevastopol dengan Rusia. Hal itu ia lakukan tanpa adanya pertimbangan politik yang menyebabkan pro kontra di kalangan Parlemen Ukraina.

Kedua, domestik konstitusi yang menyoroti tentang opini publik secara umum. Dalam penelitian ini, Yanukovych dianggap gagal sebagai pemimpin karena tidak mendengar aspirasi rakyat secara menyeluruh sehingga hal ini berujung pada protes massa yang merugikan posisinya akibat besarnya kekuatan massa yang ingin menurunkannya dari posisinya sebagai presiden.

Dalam *Kamus Hubungan Internasional*, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) diartikan sebagai serangkaian kebijakan di bidang politik dan keamanan yang ditetapkan dan dijalankan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain maupun aktor-aktor non-negara (Ashari, 2015:

194). Kebijakan luar negeri mencakup proses perencanaan, implementasi, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam studi hubungan internasional terdapat tiga model penyusunan kebijakan luar negeri, yaitu (Ashari, 2015: 194): (a) *Rational model*, yang melihat negara sebagai sebuah kesatuan yang mampu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, menetapkan beberapa alternatif pemecahan masalah, menetapkan alternatif terbaik, dan bertindak sesuai alternatif yang dipilih; (b) *Bureaucratic model*, yang melihat kebijakan luar negeri sebagai hasil kompromi individu dan organisasi di dalam sistem birokrasi suatu negara; dan (c) *Pluralist model*, yang melihat kebijakan luar negeri sebagai kebijakan yang dibentuk berdasarkan masukan dari kelompok kepentingan, kelompok usaha, opini publik, dan tekanan masyarakat. Berdasarkan beberapa model penyusunan kebijakan luar negeri tersebut, maka model yang relevan untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Ukraina pada saat itu adalah *pluralist model* karena tekanan masyarakat sangat besar dan jelas menggambarkan apa yang mereka inginkan.

Kudeta

Samuel P. Huntington (1973: 488) menyatakan bahwa ada tiga bentuk kudeta, yaitu: (a) Kudeta sempalan, yaitu kudeta yang dilakukan oleh sekelompok bersenjata (militer atau tentara) untuk menggulingkan pemerintahan tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru; (b) Kudeta wali, yaitu kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan seperti biasanya mengumumkan diri sebagai perwalian untuk meningkatkan ketertiban umum. Kudeta wali sering dilakukan dengan perubahan dari pemerintah sipil menjadi bentuk militer; (c) Kudeta veto, yaitu kudeta yang dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan skala besar berbasis luar pada pemerintah dengan oposisi sipil.

Berdasarkan pengertian kudeta yang telah dijabarkan, bentuk kudeta yang terjadi di Ukraina adalah kudeta veto karena kudeta dilakukan oleh sekelompok massa atau rakyat yang menjadi pemberontak akibat kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Ukraina. Kebijakan presiden yang tidak searah dengan keinginan rakyat Ukraina memicu aksi protes hingga terjadi kudeta. Dalam faktanya, kegiatan aksi protes yang dilakukan oleh segenap

rakyat Ukraina juga sangat didukung oleh tokoh oposisi, yaitu mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko.

Hubungan Luar Negeri

Marise Cremona dan Bruno de Witte (2008: 12) menggambarkan hubungan luar negeri sebagai bentuk hubungan eksternal (*external relation*) serta tindakan eksternal (*external action*) dari suatu negara. Sementara, Ming Wan (2001: 10) mendeskripsikan hubungan luar negeri sebagai sebuah interaksi dari suatu negara terhadap aktor-aktor lainnya terkait suatu hal, misalnya hubungan antara China dengan PBB terkait permasalahan hak asasi manusia di China. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa hubungan luar negeri adalah bentuk interaksi yang meliputi tindakan dan hubungan eksternal dari suatu negara dengan aktor-aktor lainnya terkait suatu perihal atau permasalahan.

Dalam penelitian ini, hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa terbagi dalam dua bidang. *Pertama*, bidang politik. Hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa di bidang politik tercantum dalam sebuah perjanjian asosiasi. Perjanjian tersebut berisikan tentang pokok-pokok permasalahan utama Ukraina. *Kedua*, bidang ekonomi. Hubungan luar negeri

Ukraina dengan Uni Eropa di bidang ekonomi berupa kerja sama perdagangan bebas yang bernama DCFTA.

Hubungan Luar Negeri Ukraina dengan Uni Eropa

1. Hubungan Luar Negeri Ukraina dengan Uni Eropa Pra Kudeta

Sebelum terjadinya kudeta atau pada masa kepemimpinan Yanukovych, hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa cenderung tidak konsisten karena Yanukovych membawa Ukraina lebih dekat dengan Rusia. Hubungan luar negeri yang dimaksud oleh Cremona dan De Witte (2008: 12) adalah bentuk hubungan eksternal (*external relation*) atau tindakan eksternal (*external action*) dari suatu negara. Dalam permasalahan di Ukraina, hubungan luar negeri yang menjadi tindakan serta hubungan eksternalnya di era Yanukovych terlihat lebih mendekat terhadap Rusia. Hal itu terbukti dengan keputusan yang dibuat secara sepihak oleh Yanukovych untuk menyetujui perjanjian jual beli gas murah dari Rusia pada tanggal 21 April 2010. Akan tetapi, sebagai imbalannya, Ukraina harus melepas Armada Laut Hitam terhadap Rusia.

Dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa Ukraina mendapat diskon gas sebesar 30% selama 10 tahun dan harga gas menjadi US\$ 280 per

1.000 m³. Dibandingkan sebelumnya, harga gas Ukraina hampir sama mahal dengan harga gas untuk negara-negara Eropa lainnya. Hal itu dapat dikabulkan dengan satu persyaratan, yaitu memberikan izin terhadap Rusia untuk memperpanjang sewa Armada Laut Hitam di Sevastopol dengan tambahan 25 tahun yang dihitung dari tahun 2017. Padahal jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya, Ukraina tidak mau memperpanjang masa sewa Sevastopol untuk Rusia.

Keputusan sepihak Yanukovych tersebut ternyata menuai pro kontra di dalam negeri. Pihak oposisi di dalam parlemen mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar kepentingan nasional Ukraina. Namun, Yanukovych tetap membela keputusan tersebut dan mengatakan bahwa harga gas tersebut dapat membantu menstabilkan anggaran. Penstabilan anggaran tidak hanya dapat dilakukan dengan cara menurunkan harga jual dan beli gas, tetapi juga dengan mengefisiensikan anggaran untuk menekan tingginya angka pengeluaran negara. Pernyataan tersebut dapat dianggap sebatas alasan Yanukovych saja dan sebagai bentuk nyata sikap pro-Rusia-nya karena proyek jual beli gas hanya dapat dikabulkan dengan syarat Ukraina melepaskan

kembali Armada Laut Hitam kepada Rusia.

Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dalam hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa sebab Yanukovych telah mendekatkan hubungan luar negeri Ukraina terhadap Rusia melalui persetujuan proyek gas. Akibatnya, hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa terlihat tidak konsisten. Padahal Ukraina dengan Uni Eropa telah membuat kesepakatan bersama mengenai pembangunan ekonomi dan politik dalam sebuah perjanjian asosiasi. Kesepakatan tersebut telah sukses dinegosiasikan oleh Viktor Yushchenko sejak tanggal 5 Maret 2007. Namun, Yanukovych mengubah haluan kepentingan nasional Ukraina melalui kebijakannya sendiri dalam kepentingan proyek jual beli gas dengan Rusia.

Kepentingan Yanukovych terhadap proyek jual beli gas tersebut sangat besar agar dapat menikmati keuntungan dari proyek jual beli gas murah yang diberikan oleh Rusia. Hal itu terbukti dengan praktik korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Yanukovych. Pada tahun 2012, *Transparency International Corruption Perceptions Index* menempatkan Ukraina di peringkat 114 di antara 178 negara yang diinvestigasi tingkat korupsi (Parusinski, 2012). Ukraina berada satu peringkat dengan

negara-negara seperti Bangladesh, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Suriah. Selain itu, Ukraina menjadi salah satu dari tiga negara terkorup di dunia pada tahun 2012 bersama Kolombia dan Brasil.

Dari sudut pandang Rusia, salah satu kepentingan Rusia di Ukraina adalah mengenai keamanan beserta pengaruhnya. Rusia sangat mengharapkan untuk dapat menyewa kembali Armada Laut Hitam yang akan dijadikan tameng keamanan bagi Rusia di Ukraina. Rusia menjadikan Ukraina sebagai tameng keamanannya untuk dapat memperluas pengaruhnya di negara-negara bekas pecahan Soviet. Pengaruh yang disebarkan oleh Rusia yaitu dengan cara membendung pengaruh ideologi demokrasi atau kapitalis dan menyebarkan ideologi sosialis melalui organisasi bentukan Rusia, seperti CSTO dan Uni Eurasia. Pada organisasi yang digagas oleh Rusia tersebut, Rusia berusaha mengintegrasikan kembali negara-negara bekas pecahan Soviet untuk mengimbangi pengaruh Uni Eropa, terutama di kawasan Eropa Timur. Rusia menanggapi kebijakan Uni Eropa terkait program kemitraannya dengan negara-negara Eropa Timur secara negatif. Rusia memandang bahwa kawasan Eropa Timur, terutama negara-negara bekas pecahan Uni Soviet,

sebagai zona kepentingan utama bagi Rusia (Alfiansyah, 2015: 319-320).

Dengan adanya persetujuan jual beli gas murah dan sewa Armada Laut kepada Rusia, hal itu semakin memberikan kemudahan bagi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di Ukraina sehingga Rusia pun berhasil mempengaruhi keputusan Yanukovych untuk menolak perjanjian asosiasi yang mengarah pada keanggotaan Uni Eropa. Rusia memberikan tawaran yang menggiurkan bagi kepentingan Ukraina di bawah kepemimpinan Yanukovych. Oleh karena itu, Rusia berniat untuk melakukan investasi sebanyak puluhan miliar dollar AS pada Ukraina dan akan memberikan harga gas di bawah harga pasar Eropa. Dengan demikian, Ukraina telah mendapatkan dana sebesar US\$ 15 miliar atau setara Rp 250 triliun dari Rusia serta pemangkasan harga gas untuk sementara waktu menjadi US\$ 268,5 per 1.000 m³ (Alfiansyah, 2015: 324).

Tawaran Rusia tersebut membuat Yanukovych menolak untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada tanggal 21 November 2013 (Wilson, 2014: 66). Dalam keputusannya, alih-alih menandatangani perjanjian asosiasi, ia akan memilih kerja sama dengan Uni Eurasia yang dibangun oleh Rusia

(Alfiansyah, 2015: 317). Keputusan tersebut akan berimplikasi terhadap penundaan kerja sama ekonomi antara Ukraina dengan Uni Eropa melalui perdagangan bebas.

Dengan demikian, inkonsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa terjadi karena keputusan sepihak Yanukovych dengan berbagai kebijakannya yang cenderung pro-Rusia. Kebijakan-kebijakan Yanukovych yang sangat pro-Rusia di antaranya persetujuan jual beli gas murah, penyewaan kembali Armada Laut Hitam, penolakan penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa, dan lebih memilih kerja sama ekonomi dengan Rusia.

2. Hubungan Luar Negeri Ukraina dengan Uni Eropa Pasca Kudeta

Pasca kudeta, hubungan Ukraina dengan Uni Eropa mulai dinormalisasi kembali untuk menghindari inkonsistensi. Perbaikan diawali dengan pembenahan pemerintahan dalam negeri Ukraina terlebih dahulu karena pada saat protes massa berlangsung, rakyat beserta oposisi menginginkan adanya perubahan dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan Ukraina sebelumnya telah terisi dan terbentuk oleh mayoritas rezim Yanukovych yang sangat pro-Rusia.

Awal mula adanya revolusi kedua Ukraina, yaitu ditandai dengan lengsernya Yanukovych berdasarkan keputusan resmi parlemen pada tanggal 22 Februari 2014. Sejak saat itu, Ukraina mulai melakukan perombakan pemerintahan dalam negerinya. Kemudian, untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Ukraina dibentuklah pemerintahan sementara. Tujuan dari pembentukan pemerintahan sementara tersebut adalah untuk dapat memperbaiki birokrasi pemerintahan dalam negeri, yang nantinya akan berdampak terhadap hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa.

Maka pada tanggal 23 Februari 2014, Parlemen Ukraina menunjuk Oleksandr Turchynov sebagai presiden sementara hingga pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014. Sebagai presiden pengganti yang ditunjuk oleh parlemen, Turchynov berusaha mengembalikan tujuan awal yang diinginkan oleh segenap rakyat Ukraina agar dapat berintegrasi dan lebih fokus terhadap blok Uni Eropa sehingga hubungan luar negeri Ukraina bisa lebih fokus, dekat, dan konsisten lagi terhadap Uni Eropa (Alfiansyah, 2015: 317).

Selain penunjukan presiden sementara, pada tanggal 27 Februari 2014, pihak oposisi membentuk pemerintahan yang baru sesuai dengan

harapan rakyat yang menginginkan adanya reformasi pemerintahan dalam negeri Ukraina. Formasi pemerintahan sementara dalam negeri Ukraina terdiri dari koalisi tiga partai, yakni *Fatherland*, *Svoboda*, dan *Euromaidan Activists*. *Fatherland* mendominasi formasi pemerintahan yang baru tersebut. Lalu, perdana menteri sementara Ukraina ditetapkan, yakni Arseniy Yatsenyuk. Pemerintahan sementara yang dibentuk oleh para tokoh oposisi ini berlaku selama tiga bulan sampai pemilihan presiden dilaksanakan (Åslund, 2015: 109).

Dalam program kerja pemerintah sementara Ukraina tersebut, terdapat 23 program prioritas Ukraina. 10 program di antaranya adalah (Åslund, 2015: 109-110): (a) Melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina; (b) Menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa; (c) Membangun hubungan yang baik dengan Federasi Rusia; (d) Membuat sebuah program stabilisasi yang baru dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan menarik dukungan finansial dari IMF dan Uni Eropa; (e) Stabilisasi kondisi keuangan; (f) Menjamin peraturan hukum melalui reformasi peradilan; (g) Reformasi penyelenggaraan hukum; (h) Menghukum pihak yang menjadi tersangka pembuat kekerasan dalam aksi

protes massa; (i) Membentuk sebuah sistem pemerintahan yang baru dengan dasar hukum, keterbukaan, dan transparansi; dan (j) Menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan penyelenggaraan hukum dan kehakiman yang baik.

Berdasarkan program-program prioritas Ukraina tersebut, terlihat jelas jika mayoritas rakyat Ukraina menginginkan adanya reformasi dan perbaikan dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Bahkan, salah satu pasal dalam program prioritas tersebut pun menyetujui penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Turchynov, sebagai presiden sementara Ukraina, pun bertindak langsung untuk memfokuskan hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa. Pada tanggal 21 Maret 2014, Ukraina dan Uni Eropa menandatangani pokok-pokok dasar kesepakatan pembentukan asosiasi politik yang akan memungkinkan kerja sama yang lebih erat dalam bidang politik dan ekonomi (Alfiansyah, 2015: 317).

Hal yang sudah dilakukan tersebut merupakan salah satu bentuk konsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa. Karena berdasarkan fakta, potret hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa di bawah kepemimpinan Yanukovych

sangatlah tidak konsisten. Oleh sebab itu, Turchynov, sebagai presiden sementara Ukraina, terus melakukan normalisasi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa hingga dilaksanakan pemilihan umum.

Pemilihan ulang presiden Ukraina pun akhirnya dihelat. Petro Poroshenko terpilih sebagai Presiden Ukraina dengan perolehan suara sebesar 55% dalam putaran pertama. Pemilihan umum ini dilakukan secara bebas dan adil (Åslund, 2015:114). Dengan demikian, Poroshenko secara resmi menggantikan kepemimpinan Turchynov.

Sebagai presiden terpilih, Poroshenko menyatakan bahwa program utamanya adalah mendukung segala upaya Ukraina agar dapat bergabung dengan Uni Eropa (Alfiansyah, 2015: 317). Pada tanggal 27 Juni 2014, Poroshenko pun langsung menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (Åslund, 2015: 44). Hal tersebut semakin menunjukkan bentuk keseriusan serta konsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kudeta di Ukraina telah menciptakan sebuah perubahan bagi tatanan pemerintahan dalam negeri Ukraina. Pemerintahan baru pun terus menunjukkan komitmen

dan dukungannya terhadap proses integrasi Ukraina menuju Uni Eropa. Dengan begitu, konsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa semakin terlihat.

Setelah kudeta berakhir, Ukraina melakukan pembenahan tatanan dalam negeri terlebih dahulu. Pembenahan tersebut ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku Ukraina dalam membangun kerja sama internasional serta interaksi dengan aktor-aktor lainnya. Kemudian, Ukraina mulai memfokuskan dirinya terhadap proses integrasi dengan Uni Eropa melalui perjanjian asosiasi yang sempat mengalami kebuntuan dan penundaan pada masa pemerintahan Yanukovych.

Perjanjian asosiasi merupakan kesepakatan yang telah dibuat antara Ukraina dengan Uni Eropa. Saat itu, Ukraina diwakili oleh Presiden Viktor Yushchenko sebagai inisiator utama pembentukan kerja sama strategis antara Ukraina dengan Uni Eropa. Perjanjian asosiasi diciptakan melalui interaksi antara Uni Eropa dengan Ukraina melalui *European Neighbourhood Policy* (ENP).

ENP merupakan sebuah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Uni Eropa untuk memperhalus langkah politik dan ekonomi serta memisahkan antara “orang luar” dan “orang dalam”

(Dragneva dan Wolczuk, 2015: 39). Dengan demikian, ENP merupakan sebuah instrumen kebijakan luar negeri Uni Eropa yang dirancang untuk negara-negara tetangga di sekitarnya. ENP ini juga dijadikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Uni Eropa untuk mendekatkan diri dengan Ukraina.

Dampak Kudeta dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina dengan Uni Eropa

1. Dampak Kudeta dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina-Uni Eropa di Bidang Politik

Peristiwa kudeta ternyata berdampak terhadap hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa di bidang politik yang berupa tindak lanjut perjanjian asosiasi. Perjanjian asosiasi dilahirkan dari interaksi khusus antara Ukraina dengan Uni Eropa melalui ENP. Dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri, perjanjian asosiasi merupakan kerangka kepentingan dari kedua aktor. Hal tersebut ada relevansinya dengan konsep hubungan luar negeri yang didefinisikan oleh Ming Wan. Ming mengatakan bahwa hubungan luar negeri sebagai sebuah interaksi dari suatu negara terhadap aktor-aktor lainnya terkait sesuatu hal. Jadi, hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa yakni

terkait dengan sebuah perjanjian asosiasi.

Definisi perjanjian asosiasi yaitu sebuah perjanjian yang bersifat luas, komprehensif, dan substantif. Dinyatakan komprehensif karena perjanjian tersebut meliputi berbagai bidang kepentingan. Perjanjian tersebut menawarkan peningkatan kerja sama dengan beberapa kunci kebijakan dari berbagai bidang yang meliputi kerja sama politik, kebijakan luar negeri dan keamanan, peradilan, serta kebebasan. Hal itu bertujuan untuk mempercepat hubungan antara Ukraina dengan Uni Eropa yang lebih mendalam (Åslund, 2015: 44).

Perjanjian asosiasi tersebut secara spesifik berisi tujuh bagian inti, yaitu sebagai berikut (Åslund, 2015: 44): (a) Prinsip umum; (b) Dialog politik dan reformasi, asosiasi politik, dan kerja sama yang berpusat pada bidang kebijakan luar negeri dan keamanan; (c) Peradilan, kebebasan, dan keamanan; (d) Perdagangan dan permasalahan dalam perdagangan; (e) Ekonomi dan sektor kerja sama; (f) Kerja sama keuangan; dan (g) Institusi, umum, dan ketetapan akhir.

Dari ketujuh poin tersebut, ada satu poin yang menjadi perhatian utama, yaitu perihal perdagangan sebab perdagangan bebas antara Ukraina

dengan Uni Eropa yang dikenal sebagai DCFTA dianggap dapat membantu perekonomian Ukraina. Perihal perdagangan tersebut adalah hal yang paling awal diinisiasikan oleh Yushchenko sebagai inisiator integrasi Ukraina menuju Uni Eropa pada tanggal 18 Februari 2008 sebab Yushchenko ingin membantu mengatasi permasalahan ekonomi di Ukraina pasca Revolusi Oranye. Sedangkan dari sisi Uni Eropa, Uni Eropa menawarkan janji untuk membantu pertumbuhan ekonomi Ukraina melalui pembangunan perdagangan bebas tersebut (Alfiansyah, 2015: 316).

Oleh sebab itu, perihal perdagangan atau DCFTA menjadi perhatian khusus untuk ditindaklanjuti pasca kudeta. Oleh karena itu, pada tanggal 12 September 2014, Parlemen Uni Eropa bersama Komisi Uni Eropa serta perwakilan Ukraina mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas tindak lanjut serta implementasi dari klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian asosiasi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan DCFTA akan diundur hingga 16 bulan ke depan terhitung September 2014. Selain itu, implementasi klausul-klausul lainnya juga akan terus dipertimbangkan selama tahun 2014 (Åslund, 2015: 51).

Dengan demikian, DCFTA belum dapat dilaksanakan pada tahun 2014 sebab pada tahun itu Ukraina dan Uni Eropa baru melaksanakan negosiasi ulang serta membahas tindak lanjut perjanjian asosiasi secara lebih mendalam.

Tindak lanjut perjanjian asosiasi berikutnya terjadi pada tanggal 16 September 2014. Pada tanggal tersebut, Ukraina baru mulai meratifikasi perjanjian asosiasi agar dapat diimplementasikan dengan segera. Tujuan utama ratifikasi perjanjian asosiasi adalah untuk dapat mengimplementasikan berbagai klausul yang ada di dalamnya. Ratifikasi tersebut dilakukan untuk membuka akses bagi Ukraina untuk mereformasi berbagai aspek dengan segera (Åslund, 2015:111). Hal utama yang ingin dilakukan oleh Ukraina, yaitu mereformasi ekonomi dan politik melalui ekonomi pasar dan pengadopsian standar hukum yang berlaku dalam ketetapan Uni Eropa. Oleh karenanya, tepat pada tanggal 1 November 2014, Ukraina dan Uni Eropa mulai mengaplikasikan ketetapan-ketetapan yang ada dalam perjanjian asosiasi.

Implementasi ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam perjanjian asosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa merupakan bentuk kelanjutan

kerja sama yang terjadi pasca kudeta di mana pada saat sebelum kudeta atau pada masa kepemimpinan Yanukovych, kerja sama antara kedua aktor tersebut mengalami hambatan dan cenderung inkonsisten. Hal itu terjadi karena kedekatan Yanukovych dengan Rusia, sampai Rusia pun memberikan ancaman bagi Ukraina untuk segera menjauh dari Uni Eropa.

Berikutnya, tepat pada tanggal 15 Desember 2014, diadakan sebuah pertemuan pertama antara Ukraina dengan dewan khusus dari Uni Eropa untuk membahas kelanjutan kerja sama melalui perjanjian asosiasi. Pertemuan puncak tersebut dikenal dengan istilah *Association Council*, yang bertujuan untuk melakukan pembahasan mengenai kelanjutan kerja sama kedua belah pihak, sekaligus mengevaluasi berbagai permasalahan yang terjadi untuk dapat dibenahi, serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang ada untuk dapat dioptimalkan.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kurun tahun 2014, kelanjutan kerja sama antara Ukraina dengan Uni Eropa yang terjadi setelah kudeta adalah terkait tindak lanjut perjanjian asosiasi. Tindak lanjut perjanjian asosiasi tersebut baru dapat dilanjutkan setelah Ukraina melakukan pembenahan politik dalam negeri terlebih dahulu. Ukraina

melakukan pembenahan politik dalam negeri dengan cara melakukan pemilihan ulang presiden dan parlemen serta merombak seluruh kabinet menteri. Dengan demikian, Ukraina dapat lebih fokus untuk melakukan pendekatan kembali terhadap Uni Eropa.

Pada tahun 2015, tindak lanjut perjanjian asosiasi antara Ukraina dengan Uni Eropa sudah dilakukan secara lebih mendalam. Diawali dengan *Association Council* pada tanggal 16 Maret 2015 dan dilanjutkan dengan *Progress Report Ukraine 2014* pada tanggal 25 Maret 2015. Kemudian, pada tanggal 27 April 2015, Ukraina dan Uni Eropa mengadakan sebuah pertemuan puncak yang bertajuk *EU-Ukraine Summit*. Lalu, pada tanggal 8 Mei 2015 dan 18 Desember 2015 diselenggarakan laporan perkembangan yang kelima dan keenam kalinya mengenai liberalisasi visa dari Uni Eropa untuk Ukraina. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan wujud nyata komitmen Ukraina terhadap Uni Eropa untuk mewujudkan kesepakatan dan kesepahaman bersama sehingga pada tanggal 3 Juli 2015, Parlemen Ukraina menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Uni Eropa.

Jadi, kudeta berdampak terhadap tindak lanjut perjanjian asosiasi yang diciptakan dari kerangka hubungan luar

negeri antara Ukraina dengan Uni Eropa. Tindak lanjut perjanjian asosiasi berawal dengan negosiasi ulang, penyusunan ketetapan, hingga ratifikasi perjanjian tersebut di tahun 2014. Dalam pelaksanaan negosiasi ulang, Ukraina dan Uni Eropa sepakat mengundurkan pelaksanaan DCFTA selama 16 bulan ke depan terhitung sejak bulan September 2016. Kemudian, tindak lanjut perjanjian asosiasi kembali dilanjutkan secara lebih mendalam pada tahun 2015 hingga Parlemen Ukraina dan Uni Eropa sepakat menandatangani MoU pada tanggal 3 Juli 2015.

2. Dampak Kudeta dalam Hubungan Luar Negeri Ukraina-Uni Eropa di Bidang Ekonomi

Hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa di bidang ekonomi terkait dengan pembangunan DCFTA. Setelah perjanjian asosiasi ditindaklanjuti, Ukraina dan Uni Eropa sepakat untuk memulai pelaksanaan DCFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Pelaksanaan perdagangan bebas antara Ukraina dengan Uni Eropa merupakan dampak nyata yang dapat dinikmati dari segi ekonomi dalam hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa pasca kudeta. Apabila dikaitkan dengan teori, pelaksanaan DCFTA tersebut merupakan bentuk realisasi kepentingan nasional

rakyat Ukraina. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, pelaksanaan pasar bebas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat semata, tetapi juga mengizinkan masyarakat untuk mencapai kepentingannya tanpa intervensi. Dengan demikian, kepentingan mayoritas rakyat Ukraina yang dikumandangkan dalam peristiwa protes massa saat ini sudah dapat terealisasi dengan adanya DCFTA.

DCFTA merupakan bagian keempat dalam perjanjian asosiasi yang ditindaklanjuti setelah kudeta. Ada salah satu bagian dalam perjanjian asosiasi yang juga menyoroti perihal ekonomi, yakni terdapat dalam bagian kelima yang berisikan tentang regulasi energi, statistik, perpajakan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Secara substansial, dapat dinyatakan bahwa DCFTA mengandung perihal zona perdagangan bebas. Dengan kata lain, DCFTA dapat mengurangi atau mengeliminasi hambatan perdagangan antara Ukraina dengan Uni Eropa, serta membangun kepercayaan bagi keduanya (Åslund, 2015: 44-45).

Lebih lanjut lagi, DCFTA tidak hanya sebatas pada penerapan pasar terbuka untuk barang dan jasa saja, tetapi juga berisikan ketentuan yang mengikat terhadap standar dan norma-norma perdagangan yang berlaku di Uni Eropa,

seperti peraturan mengenai standar dan penyesuaian nilai, kebersihan, hak milik atau kekayaan intelektual, fasilitas perdagangan, pengadaan publik, dan kompetisi. Selain itu, ada ketentuan yang lebih mengikat lagi terkait dengan perdagangan dalam aspek energi yang meliputi investasi dan transportasi. DCFTA juga menawarkan sebuah kerangka untuk memodernisasi perdagangan dan pembangunan ekonominya melalui pasar bebas dan harmonisasi hukum serta regulasi di dalam berbagai sektor kepada Ukraina. Hal tersebut akan sangat membantu sektor perekonomian Ukraina sesuai dengan standar Uni Eropa.

Dalam perspektif Uni Eropa, perdagangan bebas mendalam dan komprehensif tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Uni Eropa agar dapat mengintegrasikan perekonomian Ukraina ke dalam perekonomian Uni Eropa. Dengan kata lain, perdagangan bebas merupakan sebuah bentuk integrasi ekonomi. Ali El-Agraa (2007: 1) mengatakan bahwa integrasi ekonomi merupakan salah satu aspek dalam perekonomian internasional yang sedang berkembang hingga lima dekade terakhir. Lebih lanjut lagi, ia juga mengatakan bahwa salah satu implementasi dari integrasi ekonomi

yaitu melalui pemberlakuan zona perdagangan bebas.

Selain itu, DCFTA bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi antara Ukraina dengan Uni Eropa (Dragneva dan Wolczuk, 2015: 45). Dengan diberlakukannya DCFTA, perekonomian Ukraina secara otomatis dapat langsung terintegrasi dengan Uni Eropa sehingga ekspor impor antara Ukraina dengan Uni Eropa pun dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan terkait bea masuk dan kuota perdagangan.

Selain penghapusan hambatan tarif yang akan berimplikasi baik terhadap ekspor impor Ukraina dengan Uni Eropa, DCFTA juga memberikan keuntungan lain bagi Ukraina, yaitu terkait akses pasar Uni Eropa dan peningkatan aliran investasi asing langsung. Hal-hal tersebut akan dapat memodernisasi perekonomian Ukraina, merestrukturisasi pengusaha, dan menciptakan lapangan kerja (Åslund, 2015: 45). *European External Action Service* (2016) menyatakan bahwa Uni Eropa merupakan investor asing terbesar di Ukraina dalam satu dekade ini. *Trading Economics* (t.thn.) pun mencatat adanya peningkatan investasi asing langsung di Ukraina sebesar US\$ 759 sejak kuartal kedua tahun 2016. Dengan demikian, keberadaan DCFTA

bermanfaat secara langsung terhadap pembangunan ekonomi di Ukraina melalui investasi asing.

Dalam perspektif liberalisme, realisasi perdagangan bebas merupakan wujud nyata dari kebebasan ekonomi. Kebebasan mengisyaratkan hilangnya sistem yang mengatur individu untuk mengutarakan pendapat, inovasi, dan kreativitasnya. Isaac Morehouse, dalam penjelasannya di FEE Institute, menyatakan bahwa kebebasan ekonomi tidak memperbudak seseorang dan tidak pula menjamin kesejahteraan pada satu individu saja. Kebebasan dapat membuka jalan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas sebab hanya individu yang mampu mengubah tingkat kemakmuran individu itu sendiri. Dengan begitu, banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya DCFTA ini. Selain berimplikasi langsung terhadap investasi asing, DCFTA juga terbukti mampu mendorong jumlah ekspor impor Ukraina di tahun 2016. *Trading Economics* (t.thn.) mencatat bahwa ekspor Ukraina pada tahun 2016 sebesar US\$ 3.621, sedangkan impornya sebesar US\$ 3.856.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan bebas menjadi sangat penting bagi perekonomian Ukraina dan Uni Eropa

melalui penciptaan lapangan kerja, penetapan harga rendah, dan penyediaan barang-barang yang lebih berkualitas dengan pilihan yang banyak melalui peningkatan persaingan pasar dan sebagainya. James M. Roberts mengatakan “*protestors in Ukraine are demanding economic freedom*” sehingga operasionalisasi DCFTA dapat dianggap sebagai wujud nyata kebebasan ekonomi yang dikehendaki oleh rakyat Ukraina pada saat protes massa berlangsung. DCFTA berimplikasi langsung terhadap perekonomian Ukraina melalui ekspor impor serta investasi asing.

Setelah operasionalisasi DCFTA, tepat pada tanggal 1 Januari 2016, investasi asing langsung yang masuk ke Ukraina semakin meningkat. Demikian pula jumlah ekspor impor Ukraina. Hingga kini, produk-produk Ukraina dapat dijual dengan bebas di pasar Uni Eropa. Karena implikasi positifnya terhadap perekonomian Ukraina telah terbukti, perihal DCFTA pun terus dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.

Kesimpulan

Hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa sempat mengalami inkonsistensi di bawah kepemimpinan Viktor Yanukovych sebab ia lebih berpihak terhadap blok Rusia sehingga

kebijakan-kebijakan yang dibuatnya pun lebih mengarah kepada kemitraan dengan Rusia. Beberapa kebijakannya yang lebih berpihak terhadap blok Rusia di antaranya persetujuan jual beli gas murah, penyewaan kembali Armada Laut Hitam untuk Rusia, penolakan untuk menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa yang diumumkankannya pada tanggal 21 November 2013, dan lebih memilih kerja sama dalam wadah Uni Eurasia yang didirikan oleh Rusia.

Inkonsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa di bawah kepemimpinan Yanukovych tersebut telah menuai pro kontra baik di kalangan parlemen maupun rakyat Ukraina. Pro dan kontra tersebut berujung pada protes massa yang bersifat masif sehingga pada bulan Februari 2014, Yanukovych secara resmi diberhentikan dari jabatannya oleh parlemen. Lalu, parlemen menunjuk presiden sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Ukraina hingga pemilihan presiden ulang diadakan pada tanggal 25 Mei 2014.

Lengsernya rezim Yanukovych, memberikan dampak yang cukup baik bagi hubungan antara Ukraina dengan Uni Eropa. Ukraina melakukan pendekatan kembali serta konsistensi hubungan luar negerinya terhadap Uni

Eropa. Konsistensi hubungan luar negeri Ukraina terhadap Uni Eropa pasca kudeta yakni terkait dengan tindak lanjut perjanjian asosiasi. Setelah perjanjian asosiasi ditindaklanjuti, Ukraina dan Uni Eropa sepakat untuk melaksanakan perdagangan bebas yang menjadi salah satu bagian dalam perjanjian tersebut. Perdagangan bebas tersebut dikenal dengan istilah *Deep Comprehensive Free Trade Area* (DCFTA).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kudeta memberikan dampak secara langsung dalam hubungan luar negeri Ukraina dengan Uni Eropa khususnya dalam dua bidang yakni: (a) Bidang politik, berkaitan dengan tindak lanjut perjanjian asosiasi dan (b) Bidang ekonomi, berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan bebas yang memberikan manfaat secara ekonomis bagi pembangunan perekonomian Ukraina melalui ekspor, impor, maupun investasi asing.

Sebagai negara berdaulat, Ukraina berhak menentukan masa depannya sesuai kondisi dan kenyataan dalam negerinya tanpa harus mempertimbangkan tekanan-tekanan dari pihak manapun. Pada dasarnya, setiap negara yang berdaulat pasti akan selalu menjaga simbol maupun status kedaulatannya. Oleh sebab itu, negara-

negara lain pun sebaiknya menghormati dan menghargai status kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal ini, Ukraina berhak dihargai sebagai negara berdaulat, baik oleh Rusia maupun oleh negara-negara lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashari, Khasan. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2015.
- Åslund, Anders. *Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It*. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2015.
- Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Burchill, Scott. *The National Interest in International Relation Theory*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Cremona, Marise dan Bruno de Witte. *EU Foreign Relation Law: Constitutional Fundamental*. Oxford: Hart Publishing, 2008.
- Dragneva, Rilka dan Kataryna Wolczuk. *Ukraine between the EU and Russia: The Integration Challenge*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.

El-Agraa, Ali. *The European Union Economics and Policies*. Eighth Edition. New York: Cambridge University Press, 2007.

Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1973.

Ming Wan. *Human Rights and Chinese Foreign Relations*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001.

Pikulicka-Wilczewska, Agnieszka dan Richard Sakwa. *Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspective*. Bristol: E-International Relation Publishing, 2015.

Wilson, Andrew. *Ukraine Crisis: What it Means for the West*. New Haven: Yale University Press, 2014.

Jurnal

Alfiansyah, Octab. "Upaya Rusia dalam Mencegah Rencana Ukraina Masuk Keanggotaan Uni Eropa". *eJournal Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 2 (2015).

Zulfiekar, Mohammad dan Sri Yuniati. "Faktor-faktor Penyebab Krisis Politik di Ukraina". *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 12, No. 1 (2014).

Internet

Delegation of the European Union to Ukraine. "Ukraine and the EU". *European External Action Service*, 16 Mei 2016. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/1937/ukraine-and-the-eu_en (diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 15.09 WIB).

Deutsche Welle. "Pemerintah Ukraina Sebut Aksi Protes 'Kudeta'". *Deutsche Welle*, 3 Desember 2013. <http://www.dw.com/id/pemerintah-ukraina-sebut-aksi-protes-kudeta/a-17267825> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB).

European External Action Service. "EU provides €104m to support Ukraine's public administration reform". *European External Action Service*, 22 Desember 2016. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/18096/eu-provides-eu104m-support-ukraines-public-administration-reform_en (diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 15.00 WIB).

European External Action Service. "European Neighbourhood Policy (ENP)". *European External Action Service*, 21

- Desember 2016.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
(diakses pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 13.02 WIB).
- Kyiv Post. “Associated Press: Ukraine remains optimistic EU trade will be pushed through”. *Kyiv Post*, 21 Oktober 2016.
<https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/associated-press-ukraine-remains-optimistic-eu-trade-will-pushed.html> (diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 16.02 WIB).
- Parusinski, Jakub. “Ukraine inches up on international corruption index”. *Kyiv Post*, 5 Desember 2012.
<http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukraine-inches-up-on-international-corruption-index-317159.html> (diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 13.00 WIB).
- Roberts, James M. dalam *The Daily Signal*. <http://dailysignal.com>
(diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 17.00 WIB).
- Tkachuk, Viktor. “People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy”. *Kyiv Post*, 11 September 2012.
<https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/people-first-the-latest-in-the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html>
(diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 13.02 WIB).
- Trading Economics. “Ukraine Exports 2001-2017”. *Trading Economics*, t.thn.
<http://www.tradingeconomics.com/ukraine/exports> (diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 15.03 WIB).
- Trading Economics. “Ukraine Foreign Direct Investment 2001-2017”. *Trading Economics*, t.thn.
<http://www.tradingeconomics.com/ukraine/foreign/direct/investment> (diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 15.00 WIB).
- Trading Economics. “Ukraine Imports 2001-2017”. *Trading Economics*, t.thn.
<http://www.tradingeconomics.com/ukraine/imports> (diakses pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 15.03 WIB).
- UNIAN. “EU expands quotas for Ukrainian goods”. *UNIAN*, 30 September 2016.
<https://www.unian.info/economics/1548657-eu-expands-quotas-for-ukrainian-goods.html>

(diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 16.00 WIB).

UNIAN. “EU Trade Commissioner announces new trade preferences for Ukraine”. *UNIAN*, 30 September 2016. <https://www.unian.info/politics/1547757-eu-trade-commissioner-announces-new-trade-preferences-for-ukraine.html>

(diakses pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 16.01 WIB).

VOA-Islam. “Parlemen Ukraini [sic] Memecat Presiden Viktor Yanukovych”. *VOA-Islam*, 23 Februari 2014. <http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/02/23/29216/parlemen-ukraini-memecat-presiden-viktor-yanukovych/> (diakses pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 16.05 WIB).

